



Penataan Hunian di Kolong Jalan Tol Tak Pernah Usai

Sepertinya, investor jalan tol yang telah membangun prasarana sejak puluhan tahun lalu harus menanggung beban yang semestinya tidak terjadi.

Selain risiko investasi, ternyata risiko ketidakpastian terhadap regulasi menjadi penyebab membengkaknya investasi. Bahkan, investor terpaksa membenamkan kembali dananya untuk kegiatan di luar rencana bisnis. Hal itu terjadi pada investasi jalan tol di tengah Kota Jakarta.

Menanggapi penertiban hunian di bawah kolong tol ini, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, baru-baru ini, menyatakan Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan hunian ilegal di kolong jalan tol, Jakarta Intra Urbans Toll (JIUT), khususnya di kawasan Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Barat. Puluhan bangunan semipermanen yang kumuh berdiri di sana sehingga rawan terjadi kebakaran yang dapat membahayakan struktur bangunan jalan tol.

"Saya minta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera menertibkan hunian kumuh di bawah kolong tol di Jembatan Tiga. Kita tidak akan membiarkan hunian itu tambah marak. Bila dibiarkan, permukiman warga di sana mengundang kerawanan. Kalau sampai terjadi kebakaran, berpotensi merusak bangunan jalan tol. Itu membahayakan," ujar Wagub DKI Jakarta.

Sebelum permukiman itu ditertibkan, sudah semestinya Pemprov DKI menyiapkan rumah susun (rusun) di Marunda untuk menampung warga penghuni kolong tol Jembatan Tiga. Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok ini menuturkan. Bagi Basuki, warga eks penghuni kolong tol yang ber-KTP DKI tidak dikenai biaya untuk menghuni rusun Marunda. Bahkan tiga bulan pertama mereka tak dibebani sewa.

"Warga yang punya pekerjaan di wilayah Jembatan Tiga disubsidi biaya transpornya Marunda–Jembatan Tiga pergi-pulang," kata dia. Setelah ditertibkan, area eks hunian kumuh di kolong tol itu akan dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor, dan sebagian lagi dijadikan taman kota. suh/P-5